



# STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PASCA TERBENTUKNYA QUAD

(*MARINE DEFENSE STRATEGY IN DEALING WITH THREATS P  
OST THE FORMATION OF THE QUAD*)

**Sumarlin**

Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ([sumarlin@gmail.com](mailto:sumarlin@gmail.com))

## **Abstrak**

Secara resmi pembicaraan keselamatan Segi-4, Kerjasama segi-4 diawali dengan kerjasama lapang selepas tidal wave Samudera Hindia 2004 sangat memusnahkan, Dari ke-4 negara yang bersama untuk membantu dalam misi kemanusiaan dan bencana ke wilayah yang terimbas dari bencana tersebut. Itu disahkan oleh eks pemimpi Jepang Shinzo Abe tahun 2007, selanjutnya tidak berperan selama nyaris 1 dasawarsa, lebih-lebih di saat kecemasan Australia maka keterlibatan saat blok itu bakal mengusik Cina. Fakta pertahanan ini dihidupkan kembali tahun 2017, itu mencontohkan perubahan sikap di wilayah terhadap dampak Cina yang bertambah luas. Walau presiden Donal Trump dan Joe Biden menilai QUAD menjadi tujuan untuk meletakkan terutama pada kawasan samudera hindia,, terlebih menjadi penyeimbang bagi pengaruh Cina. Maka penggung jawab Quad melakukan pembicaraan resmi per-1 pada tahun 2021 dan berdialog Kembali secara online pada bulanke-3. Menghadapi proyeksi militer atau menganggap QUAD sebagai langkah penyeimbang karena integritas tegas China perairan China Selatan. Secara geografis dan politik Indonesia adalah aktor utamanya karena terletak di tengah-tengah wilayah komplik . Artikel ini meneliti bagaimana seharusnya strategi pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh QUAD di tingkat kawasan. peneliti menganalisa pentingnya membangun kemampuan nasional kami sendiri untuk mencegah ancaman kedepan baik dengan penyebaran pasukan TNI maupun meningkatkan kemampuan industri pertahanan. Penyebaran pasukan dan Industri pertahanan menemukan berpengaruh dalam situasi ini. peneliti menawarkan agar Indonesia meletakkan pasukan TNI diposisi-posisi strategis dan kesinambungan bidang industri pertahanan nasional sebagai agenda utama strategi kerawanan keamanan saat ini dan masa depan.

Kata kunci: QUAD, Indonesia, Industri Pertahanan, Strategi, Ancaman



### **Abstract**

Officially the 4th aspect of safety talks, 4th sided cooperation began with field cooperation after the 2004 Indian Ocean tidal wave was devastating, from the 4 countries that came together to assist in humanitarian and disaster missions to areas affected by the disaster. It was endorsed by former Japanese leader Shinzo Abe in 2007, and remained idle for nearly a decade, especially at a time when Australia was worried that any involvement in the bloc's time would upset China. This defense fact revived in 2017, it exemplifies the shift in attitudes in the region to China's expanding impact. Even though presidents Donal Trump and Joe Biden considered QUAD to be a goal to place primarily in the Indian Ocean region, moreover to be a counterweight to China's influence. So the person in charge of Quad has the 1st formal talks in 2021 and dialogue Back online in the 3rd month. Face military projections or regard QUAD as a counterbalance measure because of China's assertive integrity of South China waters. Geographically and politically, Indonesia is the main actor because it is located in the middle of a complex area. This article examines how Indonesia's maritime defense strategy should be in dealing with threats posed by QUAD at the regional level. researchers analyze the importance of building our own national capabilities to prevent future threats both by deploying TNI troops and enhancing the capabilities of the defense industry. The troop deployment and the defense industry found influence in this situation. the researcher suggests that Indonesia should place TNI troops in strategic positions and the sustainability of the national defense industry as the main agenda of current and future security vulnerability strategies.

**Keywords:** QUAD, Indonesia, Defence Industries, Strategy, Threat

### **1. Pendahuluan**

Para pemimpin Quadrilateral security Dialugue(QUAD) Koalisi yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India ini dibentuk pertama kali sejak tsunami Samudera Hindia tahun 2004 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak bencana. Kemudian berkumpul Kembali di Tokyo pada rabu (25/5/22) untuk pertemuan resmi "Quad." Dan Pada saat itu menguraikan "Spirit of the Quad," para pemimpin mengatakan, "Kami membawa beragam perspektif dan bersatu dalam visi bersama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kami berjuang untuk kawasan yang bebas, terbuka,



inklusif, sehat, berlabuh oleh nilai-nilai demokrasi, dan tidak dibatasi oleh paksaan.”

China mengklaim kelompok itu berusaha untuk membentuk "NATO Asia" meskipun tidak ada kesepakatan pertahanan bersama, tidak seperti Uni Eropa, yang bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi, diplomatik dan militernya. Meskipun sering tidak dinyatakan secara eksplisit, kemitraan ini dimaksudkan untuk menjadi benteng melawan agresi Tiongkok.

Keterikatan QUAD otomatis mendepak Perancis dari mitra pengembangan kapal selam nuklir Australia yang kontraknya sedang berlangsung saat itu. Perancis menolak dengan keras dan bahkan sempat menarik diplomatnya dari Australia dan Amerika Serikat. Keberatan datang juga dari negara yang sebenarnya menjadi sasaran dari adanya blok tersebut, Cina. Amerika Serikat ditudingnya masih bermental “perang dingin” dan bergerak berdampak kepada kestabilan wilayah Asia Pasifik.

Indonesia sudah menyadari dengan kebijakan negara tetangganya di selatan ini. Gema ingin mempunyai kapal selam nuklir, dan alat utama sistem senjata canggih lainnya, berpedoman sejak Australia merilis Buku Putih Pertahanan tahun 2016. Ini dipertegas lagi pada Juli 2020 lalu ketika Australia merilis Resistance Vital Upgrade dan Drive Structure Arrange yang menampilkan dengan jelas guide akuisisi sejumlah alutsista strategis hingga 2 dasawarsa.

Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Indonesia menyikapinya? Apa potensi yang bisa dikedepankan Indonesia agar relevan dalam menjawab implikasi dari pembentukan pakta keamanan tersebut? Meskipun Indonesia bagi Australia bukan ancaman utama jika diukur dari perbandingan kekuatan militer, dan begitu juga sebaliknya, tetapi menjadi permisif tampaknya bukan strategi yang bijak. Pacuan senjata dan persaingan geopolitik di kawasan pastinya bukan kondisi yang Indonesia inginkan.



Tulisan ini terlebih dahulu mengulas bagaimana implikasi pendirian AUKUS terhadap arsitektur keamanan kawasan. Selanjutnya kami akan membahas pilihan strategi apa yang Indonesia miliki dan apa yang sudah coba diterapkan. Sebagai clue untuk bahasan inti, kami berargumentasi bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negerinya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Strategi Politik Luar Negeri**

Strategi adalah suatu rencana tindakan yang dirancang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan beserta langkah-langkah untuk mencapainya (Wylie, 1989). Strategi adalah tentang memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan. Ketika ada lebih banyak sumber daya yang tersedia, maka strategi juga berbicara tentang bagaimana memilih sumber daya yang tepat (Heuser, 2019, p. 20). Sementara itu politik luar negeri adalah upaya pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan peristiwa di luar batas negara, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah negara lain (Heywood, 2011, hlm. 129). Strategi kebijakan Luar negeri didefinisikan menjadi planning tertulis atau tertulis untuk mengkoordinasikan dan menggunakan segala cara kekuasaan untuk mencapai tujuan konservasi negara dan memajukan kepentingan nasional (Deibel, 2007, hlm. 10). Strategi Kebijakan luar negeri adalah tentang bagaimana suatu negara menilai dan memanipulasi lingkungan strategisnya. Upaya ini akan terlaksana ketika secara komprehensif situasi luar dan dalam negeri dinilai dan dianalisis kemudian disusun rencana pelaksanaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

### **2.2. Ancaman**

Ancaman adalah salah satu variabel utama dalam strategi politik luar negeri. Sederhananya, ancaman adalah sesuatu dari luar aktor yang bisa berdampak kontrak-produktif terhadap keamanan atau keberadaan aktor tersebut. Jika jenis



ancamannya adalah ancaman militer, maka itu dapat berupa potensi agresi yang mengancam pertahanan negara. Jika itu ancaman ekonomi, maka itu dapat berupa resesi global yang mengancam pendapatan dan belanja masyarakat.

Globalisasi mendorong interaksi yang semakin erat antar negara yang membuat hubungan keamanan antar negara yang berdekatan saling terpengaruh satu sama lain. Hal ini kemudian menciptakan konstelasi keamanan yang kompleks dan unik di suatu kawasan. Perubahan pada tatanan keamanan akibat seperti intrusi aktor great power yang berusaha mengkonstruksi ulang arsitektur keamanan kawasan akan diterjemahkan sebagai ancaman oleh aktor tradisional/negara di wilayah tersebut (Buzan & Woever, 2003).

### 2.3. Industri Pertahanan

Definisi industri pertahanan secara akademik sulit disepakati karena bergantung pada konteks dan peristiwa – apakah saat masa damai atau perang, apakah tergantung besaran bidang usaha kemiliterannya, apakah bisa dimobilisasi saat perang atau tidak (Hall et al., 2010, pp. 82–83). Oleh karena itu, tulisan ini akan memakai definisi yang diakui resmi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendefinisikan industri pertahanan adalah sebuah badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang sebagian atau seluruh bidangnya berkaitan dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa pemeliharaan. Industri pertahanan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan berlokasi di wilayah Indonesia. Tingkatan jenis alpalhankam yang diproduksi dapat berupa alat utama, komponen, hingga bahan baku.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Informasi dikumpulkan dari sumber yang relevan, dan dari majalah, buku, dan artikel online. Peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis data yang dimiliki untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang valid.



#### **4. Hasil dan Diskusi**

##### **4.1. QUAD dan Implikasinya Terhadap Keamanan Kawasan**

Pembentukan QUAD pada 25 Mei 2022 lalu merupakan produk dari persepsi ancaman Australia dan sekutu utamanya AS terhadap kebangkitan Cina. Australia relatif jauh dari Cina, dan Cina juga mitra ekonomi terbesarnya. Tetap, Australia ingin kawasan sekitarnya harus terbebas dari kekuatan yang berlawanan secara politik dengannya dan jalur rantai pasok globalnya aman dari potensi intimidasi dan penggunaan kekuatan koersif lawan (Australian Department of Defence, 2020). Sementara itu, AS memiliki kepentingan yang sama dan berusaha untuk mempertegas kehadirannya di pesisir Asia. Blok ANZUS dan QUAD telah terlebih dahulu eksis. Oleh karena itu, pada dasarnya munculnya bentuk hubungan seperti QUAD bukanlah perkara yang mengejutkan (Wende, 2022).

Cina sekarang memiliki postur kekuatan angkatan laut terkuat di dunia. Kemajuan teknologi militer Cina telah memperkuat presisi, letalitas, dan mempercepat pengolahan data untuk pengambilan keputusan taktis. Pada pertengahan 2020 lalu, Australia mengagendakan alokasi anggaran untuk investasi kapabilitas Total A\$575 miliar (setara dengan lebih dari Rp6.000 triliun) dicapai dalam sepuluh tahun. Dari jumlah itu, \$270 miliar dialokasikan untuk investasi kapasitas, jauh di atas program investasi sepuluh tahun Buku Putih Pertahanan Australia 2016 yang bernominal 195 miliar dollar.

Australia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. SIPRI melaporkan bahwa Australia merupakan importir alutsista terbesar keempat dunia dari tahun 2014 hingga 2018, 60% di antaranya berasal dari Amerika Serikat (Wezeman et al., 2019). Australia mengimpor helikopter angkut Chinook, rudal anti-kapal Harpoon, pesawat angkut Boeing C-17, rudal permukaan-ke-udara SM-2 dan torpedo ringan Mk-54.



Asia Tenggara adalah kawasan yang akan paling terdampak, bukan hanya karena proksimitas geografisnya dengan Australia, tapi juga posisinya yang sangat strategis di tengah kancah geopolitik global. Kawasan ini memiliki ASEAN sebagai organisasi regional paling utama yang sudah bertahan lebih dari setengah abad. ASEAN jugalah yang menjadi instrumen terpenting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memelihara arsitektur keamanan kawasan.

Medan rivalitas geopolitik Australia dan Cina sebenarnya untuk lebih dekat ke Indonesia daripada Australia sendiri Indonesia adalah koneksi geografis Australia ke hampir setiap negara di Samudra Hindia dan Pasifik. Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, pusat Australia, sama-sama ada di halaman depan Indonesia.

ASEAN akan dihadapkan pada dilema keamanan, intensifikasi rivalitas antar great power, dan potensi disintegrasi (Cheng, 2022). Kapal selam nuklir saja, cukup untuk memicu pacuan senjata di di negara-negara Asia Pasifik, belum lagi peluru kendali hipersonik yang juga ada dalam shopping list Australia. ASEAN yang sejak lama berkomitmen untuk menjadi wilayah bebas nuklir akan menyaksikan kapal-kapal selam konvensional yang dimiliki negara-negara anggotanya adalah perbandingan tidak sepadan dengan sebuah kapal selam nuklir.

QUAD jelaskan semakin menambah bahan bakar konfrontasi antara Cina dan AS di kawasan. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi kedamaian dan kesejahteraan kawasan. Negara-negara ASEAN seluruhnya masih bergantung pada satu atau kedua pihak diatas untuk mendukung militer dan ekonomi nasionalnya.

Integrasi keamanan antara anggota ASEAN tidak secanggih Uni Eropa, dengan demikian ASEAN lebih rentan terhadap perubahan tatanan keamanan kawasan. Perbedaan sikap antar negara anggotanya atas QUAD sudah membuktikan bahwa polarisasi kian gamblang di dalam ASEAN. Tren ini jelas kontraproduktif dengan harapan semakin terintegrasinya Asia Tenggara baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.



#### 4.2. Strategi Indonesia

Dalam menyakapi peningkatan intensitas ancaman, strategi suatu negara dapat bervariasi, dari yang mengutamakan kekuatan koersif melalui akuisisi pertahanan hingga pendekatan yang lebih persuasif via diplomasi. Unsur militer pun kini juga semakin intensif dikerahkan untuk aktivitas kooperatif yang dikenal dengan diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Misalnya, untuk membangun kepercayaan Dengan AS di bidang maritim, Indonesia rutin menyelenggarakan latihan CARAT bersama (Marpaung et al., 2020)).

Ketika berhadapan negara yang jauh lebih kuat, negara-negara yang lebih kecil hanya dihadapkan pada 4 (empat) strategi: (1) menerima apa adanya statusnya sebagai negara kecil dengan menganggarkan anggaran pertahanan yang kecil dan mengambil segala resiko yang datang bersama dengan keputusan itu; (2) mendeklarasikan diri aktif secara netral, yang mana ini berlaku ketika dalam situasi perang di sekitar negara; (3) mencari pelindung ke negara besar dan kuat; dan membentuk aliansi ke negara yang sekepentingan (Markowski et al., 2010, p. 6).

Pertanyaan yang mungkin mengemuka terkait isu yang dibahas pada penelitian ini adalah mengapa yang menjadi sorotan justru bagaimana strategi Indonesia menyikapi eskalasi ancaman di tingkat kawasan, alih-alih yang ancaman yang langsung mengarah ke Indonesia akibat pembentukan AUKUS tersebut. Jawaban pertama, pembangunan kapabilitas militer Indonesia tidak berkorelasi dengan persepsi ancaman oleh Australia yang secara kualitatif dapat dilihat dari kebijakannya beberapa waktu terakhir. Kedua, Indonesia lebih mempersepsikan ancaman yang berdampak pada perubahan arsitektur keamanan kawasan yang dapat dilihat dari bagaimana strategi Indonesia menyikapi kebijakan Indo-Pasifik Amerika Serikat dan sekutu (Oktaviano et al., 2020).

Indonesia merupakan penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi Indonesia, Ada banyak potensi yang dapat digunakan dan dikerjakan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan Asia Kawasan



Pasifik bukanlah perebutan wilayah dan sumber daya alam, juga tidak tunduk pada klaim superioritas yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan (Marsudi, 2019). Strategi politik luar negeri Indonesia Asia-Pasifik/Indo-Pasifik sudah ada sejak tahun 2013, yang kesemuanya menyimpang dari asumsi bahwa Indonesia menganut Indo-Pasifik sebagai pusat Indonesia (Scott, 2019).

Respon RI pasca dideklarasikannya QUAD cukup mudah ditebak, menaruh kekhawatiran terhadap kemungkinan pacuan senjata dan amplifikasi dampak keamanan kedepannya dengan menggandeng kekuatan besar di luar kawasan, meskipun tanpa secara langsung menyebutkan QUAD. Naif bagi Indonesia untuk tidak merasakan dilema keamanan, tetapi tetap ada diplomasi yang dimainkan agar sikap Indonesia tidak dianggap bersikap frontal terhadap salah satu pihak. Tetapi di saat yang sama tampaknya situasi ini menunjukkan ketidakcakapan Indonesia dalam menyikapi isu tersebut. ASEAN, instrumen kolektif andalan Indonesia justru menampilkan adanya ketidakseragaman respon, satu sisi keberatan seperti Indonesia dan Malaysia, seperti yang lain menyambutnya karena akan menjadi penyeimbang agresifitas Cina (Jaknanihan, 2021).

Strategi Indonesia diatas sangat beralasan. Indonesia berpegang pada doktrin bebas aktif, menolak alignment ala Australia, tetapi tidak dapat memungkiri ancaman nyata Cina di Laut Cina Selatan. ASEAN, khususnya Indonesia, menjembatani Australia dan Cina secara geografis tetapi tidak secara strategis (E. A. Laksmna, 2021). Perkara dilematis terbesar bagi Indonesia justru datang dari dalam, yaitu keterbatasan kekuatan militer Indonesia. Selain mengikis daya tawar Indonesia dalam mengimplementasikan strategi politik luar negerinya, kapabilitas militer Indonesia saat ini diragukan untuk mampu mengantisipasi skenario ketika wilayah Indonesia menjadi medan pertikaian antar kekuatan-kekuatan besar di atas.

Tidak dapat dipungkiri orientasi QUAD sedikit banyak berkesusaian dengan kepentingan keamanan nasional Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus Laut Cina Selatan, Indonesia secara politis mengutamakan pendekatan diplomatik, namun



tidak dapat dipungkiri bahwa insiden dengan nelayan asing, kapal penjaga pantai dan drone bawah laut telah sangat mengganggu proteksi Indonesia. Dengan demikian, Argumen seperti efek koersif aktivitas zona abu-abu di Laut Cina Selatan sebenarnya lebih kuat dirasakan oleh Indonesia daripada oleh Australia sendiri (Nabbs-Keller, 2020).

Diplomasi tetap berlanjut dengan berbagai pendekatan yang dianggap relevan tetapi pembangunan kemampuan pertahanan negara tetap tidak dapat digantikan apalagi dikurangi. Akuisisi kapabilitas militer adalah keniscayaan mempertimbangkan penguasaan teknologi dan kemampuan produksi Indonesia masih sangat terbatas. Tetapi itu semua hendaknya dilaksanakan dalam kerangka pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

#### 4.3. Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri

Indonesia bukan negara kecil dalam hal bentang geografis, jumlah penduduk, dan Pendapatan Domestik Bruto, tetapi dalam konteks anggaran pertahanan, Indonesia relatif tergolong small state. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2022 adalah 134,6 Triliun Rupiah. Anggaran ini lebih kecil 40 Triliun Rupiah daripada Singapura yang luas wilayahnya kurang dari 0,01% Indonesia.

Negara kecil dengan anggaran belanja yang kecil memiliki daya tawar yang kecil yang membuat pengaruhnya terbatas dalam menentukan harga dan spesifikasi. Akses negara tersebut juga sangat terbatas terhadap sistem persenjataan utama pada teknologi militer terkini. Hal ini bisa terjadi karena negara kecil memiliki sumber daya yang terbatas untuk berinvestasi dan menguasai sistem tersebut. Belum lagi kebijakan negara maju yang tidak bersedia membagikan pengetahuan akan teknologi yang krusial. Kondisi ini dapat dilihat pada kasus program KFX/IFX yang mandek dan hampir tidak menjanjikan teknologi pesawat terbang apapun yang signifikan kepada Indonesia akibat restriksi dan limitasi dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Lebih lanjut, negara kecil juga dihadapkan pada nilai keekonomian yang rendah ketika memproduksi sendiri persenjataannya karena



anggaran pertahanan negara tersebut hanya bisa membeli dalam kuantitas yang sedikit. Selain itu negara kecil juga sulit untuk menarik produsen material alutsista yang kompetitif di kancah internasional (Markowski et al., 2010, pp. 4–5).

QUAD sejatinya adalah tentang industri pertahanan. Australia menyadari untuk menangkal kemajuan signifikan militer Cina di kawasan Indo-Pasifik, negaranya tidak bisa serta merta bergantung pada perlindungan Amerika Serikat. Cina juga lebih dekat secara geografis dengan Australia ketimbang AS. Untuk itu Australia harus memacu kemandirian pemenuhan alutsista dalam negeri.

Australia bukan negara yang tenar dalam hal produksi alutsista lokal, meskipun sejumlah korporasi alutsista kenamaan internasional punya cabang di Australia seperti Lockheed Martin. Untuk merespon gray-zone warfare, second island chain, dan berbagai metode kampanye militer Cina lainnya, Australia harus sudah memiliki dan mampu memproduksi alutsista state of the art. Oleh karena itu, AUKUS dihadirkan agar keunggulan teknologi dan penguatan rantai pasok dengan AS dan Britania dapat diwujudkan sehingga memicu pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri Australia.

Bukan mustahil tentunya untuk mereplikasi strategi yang sama di Indonesia. Pilihan untuk berpolitik non-aliansi memaksa Indonesia untuk mampu berdikari dalam membangun pertahanannya. Membangun dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri merupakan strategi terbaik dalam konteks ini.

Potensi pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri di Indonesia sudah ada sejak lama. PT. Dirgantara Indonesia misalnya sebelum krisis moneter tahun 1998, merupakan salah satu produsen dan penawar jasa pemeliharaan pesawat terbang ternama di Asia. PT. Pindad juga menghasilkan senapan yang tercatat berhasil memenangkan sejumlah kontes menembak di luar negeri.

Industri pertahanan nasional berperan dalam pelaksanaan rematerialisasi serta pengadaan pemenuhan kebutuhan alutsista hingga kegiatan revitalisasinya.



Industri pertahanan menjadi salah satu pilar pembinaan kekuatan pertahanan yang diatur dalam Undang-Undang no 3 tahun 2002. Dalam MEF, Industri pertahanan berperan sebagai subjek Kebijakan yang memenuhi kebutuhan alutsista dan objek kebijakan MEF untuk pencapaian kemandirian Industri pertahanan.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ada lebih dari seratus perusahaan pertahanan di Indonesia dengan sembilan diantaranya adalah BUMN (Ditjen Potan Kemhan, 2021). Sejumlah nama sudah pernah ambil bagian dalam ekspor barang atau jasa ke luar negeri seperti PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. Pindad, dan PT. Lundin. Namun demikian, hingga kini belum ada satu perusahaan pertahanan pun di Indonesia yang masuk ke dalam 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia.

Transformasi industri Pertahanan pasca Perang Dingin membuka peluang besar bagi negara dengan skala industri pertahanan yang masih terbatas. Peningkatan jumlah korporasi pertahanan memberikan lebih banyak pilihan mitra bagi industri pertahanan dalam negeri. Insentif transfer teknologi dan pembentukan jaringan rantai suplai lebih memungkinkan saat ini melalui produksi bersama, pengembangan bersama, sub-kontrak dan model kemitraan antar industri pertahanan antar negara saat ini (Kurç & Neuman, 2017, pp. 219–220).

Indonesia menargetkan diri untuk kemandirian pemenuhan alpalhankam akibat trauma embargo di masa lalu. KKIP pada 2015 lalu menetapkan 7 program (alpalhankam) prioritas – tank medium, kapal selam, pesawat tempur, radar, rudal, roket, dan propelan – untuk dikuasai teknologinya dan dikembangkan di dalam negeri. Seiring Jakumhanneg yang dikeluarkan awal 2021 lalu, meskipun belum dideklarasikan secara formal, program prioritas ditambah dengan pesawat terbang nirawak (drone), satelit militer, dan penginderaan bawah air.

Semangat self-sufficiency dan bahkan cenderung autarki Indonesia (Kurç & Neuman, 2017) dalam mengelola industri pertahanan belum diiringi oleh sumber daya yang luar biasa. Negara-negara Asia menginvestasikan sumber daya yang



tidak sedikit untuk membuat industri pertahanannya bergeliat aktif, tetapi belum ada yang mampu sepenuhnya memproduksi alutsista strategis sendiri selain Cina dan Jepang (Bitzinger, 2017) Sumber daya yang besar pun juga harus diiringi oleh tekad nasional yang kuat, program pengembangan yang tepat guna, dan upaya yang berkesinambungan. Pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan beragam kebijakan dalam empat puluh tahun terakhir baik melalui pendekatan industri, pendekatan militer, pendekatan militer, atau yang secara spesifik untuk industri pertahanan (Susdarwono et al., 2020). UU Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 sudah memberikan insentif legal yang luar biasa sebenarnya dengan mengunci pengadaan alpalhankam. Pengadaan alpalhankam yang sudah mampu diproduksi industri pertahanan di dalam negeri harus dibeli di dalam negeri. Kedua, apabila pengadaan pada akhirnya dilaksanakan dari luar negeri, maka Hadiah Bisnis, Konten Lokal, dan Kompensasi (IDKLO, termasuk transfer teknologi di dalamnya) wajib untuk diimplementasikan. Karena kedua mekanisme di atas sehari-harinya dikoordinasikan oleh KKIP, maka KKIP sebenarnya adalah salah satu aktor sentral dalam strategi Indonesia menghadapi eskalasi ancaman di kawasan baik di masa kini maupun masa mendatang.

Sentralisasi industri pertahanan tidak hanya sebatas bagaimana memaksimalkan kontribusi industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alpalhankam, tapi juga tentang menjadikan pengembangan industri pertahanan sebagai agenda utama diplomasi. Hal ini sebaiknya juga diimplementasikan lebih luas dari sekedar promosi produk industri pertahanan. Hubungan industri pertahanan dalam skala yang besar dengan negara-negara besar, selain membantu menutupi, kekurangan penguasaan teknologi, juga sekaligus membangun hubungan saling percaya dan hubungan interdependensi. AUKUS sendiri juga faktanya merupakan perwujudan diplomasi pertahanan Australia untuk membangun kapabilitas industri pertahanannya di bidang siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan teknologi bawah air (Price, 2021).



Investasi negara kepada industri pertahanan dalam negerinya dapat disebabkan oleh satu atau lebih faktor berikut: : mengamankan pasokan (supply security), nasionalisme teknologi, dan adaptasi militer (DeVore, 2021). Faktor ketiga mungkin relatif tidak relevan dengan Indonesia karena gelar militer Indonesia dalam beberapa dekade terakhir lebih banyak berhadapan dengan aktor dalam negeri dalam skala kecil ketimbang menghadapi agresi militer asing (E. Laksmana et al., 2020, p. 291). Tetapi dua faktor lainnya diharapkan bisa menyadarkan dan me-trigger pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri pertahanan dengan signifikan.

Negara yang menguasai teknologi dan memproduksi adalah negara yang menguasai rantai pasok dan negara yang menguasai rantai pasok adalah negara yang bisa mendikte politik luar negeri negara lain. Transfer teknologi dan litbang yang serius adalah kunci strategi dalam berhadapan dengan negara yang demikian. Pada situasi ini, industri pertahanan adalah aktor utama sekaligus sumber daya (means) strategi utama. Muaranya adalah Indonesia tidak lagi bergantung penuh pada salah satu pihak yang berebut pengaruh di kawasan untuk membangun kekuatannya. Bagaimanapun juga, kebebasan dan keaktifan Indonesia dalam menerapkan “bebas aktif” berbanding lurus dengan kapabilitas nasional yang dimiliki.

## 5. Kesimpulan

QUAD adalah isu yang tidak bisa diabaikan begitu saja mempertimbangkan implikasinya dalam jangka panjang. Pacuan senjata dan potensi friksi antar anggota ASEAN tidak akan berdampak baik bagi kepentingan nasional Indonesia. Strategi Indonesia dalam menyikapi peristiwa serupa hendaknya tidak lagi mengandalkan sepenuhnya diplomasi kolektif via ASEAN atau model implementasi bebas aktif lainnya. Pada akhirnya membangun kapabilitas militer tetap penting, namun dengan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Dalam situasi yang



tidak menentu, kemandirian pemenuhan alpalhankam nasional harus semakin progresif. Dengan ini Indonesia memiliki daya tawar dan daya tangkal yang lebih besar dalam menanggulangi ancaman dan memelihara tatanan keamanan kawasan yang lebih kondusif.

### Daftar Pustaka

- Australian Department of Defence. (2020). 2020 Defence Strategic Update.
- Bitzinger, R.A. (2017). Industri Pertahanan Asia dan Dampaknya Terhadap Aset Militer. *Studi Pertahanan*, 17 (3), 295-311. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1347871>
- Buzan, B., & Woever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. The International Institute for Strategic Studies.
- Deibel, TL (2007). *Strategi kebijakan luar negeri: Logika untuk pekerjaan pemerintah AS*. Pers Universitas Cambridge.
- DeVore, M. R. (2021). Armaments after autonomy: Military adaptation and the drive for domestic defence industries. *Journal of Strategic Studies*, 44(3), 325–359. <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1612377>
- Ditjen Pothan Kemhan. (2021, June). *Profil Industri Pertahanan*. Pothan Magazine.
- Hall, P., Markowski, S., & Wylie, R. (2010). Supply: Defence industry. In S. Markowski, P. Hall, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A small country perspective* (pp. 82–114). Routledge.
- Hall P , Markowski S , & Wylie R (2010) . *Livery*:



- industri pertahanan. Dalam S. Markowski , P . Hall, & R. Wylie (eds.), *Akuisisi Pertahanan dan Kebijakan Industri: Perspektif Negara Kecil* (hlm. 82–114). Routledge..
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Kurç, Ç., & Neuman, S. G. (2017). Defence industries in the 21st century: a comparative analysis. *Defence Studies*, 17(3), 219–227. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1350105>
- Laksmana, E. A. (2021, October 17). AUKUS mixed reception a symptom of strategic fault-lines in Southeast Asia. *East Asia Forum*. <https://www.eastasiaforum.org/2021/10/17/aukus-mixed-reception-a-symptom-of-strategic-fault-lines-in-southeast-asia/>
- Laksmana, E., Gindarsah, I., & Maharani, C. (2020). 75 tahun TNI: Pembangunan Ekonomi Pertahanan, Operasi dan Organisasi Militer Indonesia 1945-2020. Pusat Studi Strategis dan Internasional.
- Lee, L (2020). peringkat empat: Peluang dan keterbatasan kerjasama quadripartite untuk memajukan kepentingan Australia (analisis Lowy Institute). <https://www.lowyinstitute.org/publications/assessing-quad-prospects-and-limitations-quadilateral-cooperation-advancing-australia>
- Markowski, S., Hall, P., & Wylie, R. (2010). Introduction. In P. Hall, S. Markowski, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A small country perspective* (pp. 1–8). Routledge.
- Marpaung, M. A., Manarni, C. S., & Halkis, M. (2020). Indonesia's Defense Diplomacy through the United States: Case Study of Cooperation a Float Readiness and Training (CARAT) 2019 Joint Exercise. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(4). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i4/HS2004-059>



- Marsudi, R. (2019). Retno L.P., Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marsudi tahun 2019. Kementerian Luar Negeri. [kemlu.go.id/portal/id/read/55/pidato/questions-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2019](http://kemlu.go.id/portal/id/read/55/pidato/questions-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2019)
- Nabbs-Keller, G. (2020, 3 Juli). Pembaruan strategis Australia: Apa artinya bagi Indonesia. Penerjemah <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-s-defence-strategic-update-what-it-means-indonesia>
- Octaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Strategi pertahanan Indonesia menuju Indo-Pasifik (studi kasus: perspektif ASEAN di kawasan Indo-Pasifik). *Urusan Internasional dan Strategi Global*, 80, 21-29. <https://doi.org/10.7176/IAGS/80-04>
- Scott, D (2019). Indonesia bertarung dengan Indo-Pasifik: Hubungan masyarakat, dialog strategis dan diplomasi. *Jurnal Urusan Asia Tenggara Saat Ini*, 38(2), 194-217. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
- Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. *USM Law Review*, 3(1), 155–181.
- Wezeman, P.D., Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N. dan Wezeman, S.T. (2019). *Tren Transfer Senjata Internasional, 2018 (Lembar Fakta SIPRI)*. [https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs\\_1903\\_at\\_2018.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf)
- Wylie, J. (1989). *Military Strategy: A General Theory of Power Control*. Naval Institute Press.
- Marpaung, M. A. (n.d.). *Sentralisasi Industri Pertahanan Dalam Strategi Indonesia Menghadapi Eskalasi Ancaman Pasca AUKUS*.